

LAPORAN TESIS

**TATA LAKSANA PEMBUATAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI
ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN
JIWA (ODGJ) (STUDI KASUS DI RS BHAYANGKARA
TK.III TULUNGAGUNG)**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2



Disusun oleh:

Nama : dr. Matheos Lucky Haurissa, Sp.THT-KL

NIM : 21.C2.0101

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

LAPORAN TESIS

TATA LAKSANA PEMBUATAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) (STUDI KASUS DI RS BHAYANGKARA TK.III TULUNGAGUNG)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2



Disusun oleh:

Nama : dr. Matheos Lucky Haurissa, Sp.THT-KL

NIM : 21.C2.0101

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

ABSTRAK

Tindak pidana pemerkosaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan dimensi biologis, psikiatrik, serta perlindungan kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana. Dalam proses pembuktian, *Visum et Repertum* (VeR) memiliki peran strategis sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum acara pidana. Namun demikian, praktik penyusunan VeR dalam perkara yang melibatkan korban ODGJ menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur ketidakmampuan memberikan persetujuan (*consent*) yang sah akibat gangguan mental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum pembuatan VeR sebagai payung hukum perlindungan ODGJ, tata laksana penyusunan VeR agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dokter dalam pembuatan VeR pada kasus pemerkosaan terhadap ODGJ.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan dokter forensik RS Bhayangkara Tk. III Tulungagung, penyidik Polres Tulungagung, serta pihak laboratorium forensik. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum, teori pembuktian, teori perlindungan hukum, dan praktik medikolegal di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan VeR memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tata laksana VeR yang memiliki kekuatan pembuktian harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan sesuai standar profesi melalui integrasi pemeriksaan biologis dan psikiatrik. Kualitas VeR dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, kompetensi dan integritas dokter, koordinasi antar aparat penegak hukum, ketersediaan sarana prasarana, serta kondisi psikologis korban ODGJ.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara kedokteran forensik dan psikiatri forensik merupakan kunci dalam memperkuat fungsi *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pemerkosaan terhadap ODGJ, sekaligus sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci: *Visum et Repertum*, ODGJ, pemerkosaan, pembuktian pidana, perlindungan hukum, kedokteran forensik.

ABSTRACT

The crime of rape against Persons with Mental Disorders (Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ) constitutes a complex legal issue as it involves biological, psychiatric, and vulnerable group protection dimensions within the criminal justice system. In the evidentiary process, Visum et Repertum (VeR) holds a strategic role as documentary evidence legally recognized under criminal procedural law. However, the preparation of VeR in cases involving ODGJ victims faces significant challenges, particularly in proving the element of incapacity to provide valid consent due to mental impairment. This study aims to analyze the legal foundations of VeR preparation as a legal protection framework for ODGJ, the procedural implementation of VeR to ensure valid evidentiary strength, and the factors influencing physicians in preparing VeR in rape cases involving ODGJ victims.

This research employs a juridical-empirical method with a qualitative approach. Data were collected through literature review and in-depth interviews with forensic physicians at Bhayangkara Hospital Level III Tulungagung, investigators from Tulungagung Police Resort, and forensic laboratory personnel. Data analysis was conducted qualitatively by examining the relationship between legal norms, evidentiary theory, legal protection theory, and medico-legal practices in the field.

The findings indicate that the preparation of VeR has a strong legal foundation under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The procedural implementation of VeR must be conducted systematically, objectively, and in accordance with professional standards through the integration of biological and psychiatric examinations. The quality of VeR is influenced by legal substance, physician competence and integrity, coordination among law enforcement authorities, availability of facilities and infrastructure, and the psychological condition of ODGJ victims.

This study concludes that the integration of forensic medicine and forensic psychiatry strengthens the function of Visum et Repertum as evidentiary evidence in rape cases involving ODGJ while serving as a legal protection instrument for vulnerable victims within the criminal justice system.

Keywords: *Visum et Repertum, persons with mental disorders, rape, criminal evidence, legal protection, forensic medicine.*